

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN OLEH DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG (Studi Kasus Di Kabupaten Paser)

Fadlan¹

Abstrak

Fadlan, NIM.1002015154, Judul Skripsi “Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, (Studi Kasus di Kabupaten Paser”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten paser dan juga untuk menganalisis kendala-kendala dalam pengawasan dan pengendaliannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan dengan cara primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pelaksana tugas Kepala Dinas Bina marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan penggunaan dokumen, untuk analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat diketahui bahwa pihak dinas sudah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur jalan kabupaten walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, atau tidak seratus persen masalahnya teratasi.

Kata Kunci : *Pengawasan dan Pengendalian, Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tentu menginginkan adanya suatu fasilitas yang baik. Adanya perbaikan dan peningkatan disegala

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

bidang, hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan yang baik di segala bidang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk dapat memaksimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dalam mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan nasional telah berkembang di masing-masing daerah, daerah pun merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor, termasuk di dalamnya sektor transportasi.

Dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat, mutlak membutuhkan beberapa infrastruktur penting, salah satunya diantaranya adalah jalan.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, jalan merupakan barang publik. Barang publik adalah yang memiliki karakteristik *non-rival* dan *non-exclude*. *Non-rival* adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan barang lain pada waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat, sedangkan *non-exclude* adalah barang yang apabila seseorang ingin mendapatkan manfaat dari barang tersebut, maka tidak perlu membayar.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012, secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 kilometer atau 10 persen jika dibandingkan dengan total jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer. Jika melihat dari kondisinya, dapat dikatakan jalan-jalan yang ada di Provinsi Kalimantan saat ini berada dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi jalan-jalan penghubung baik itu jalan nasional maupun jalan daerah sudah sangat mengkhawatirkan, terutama di ruas-ruas jalan Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Kabupaten Paser adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan yang dapat ditempuh menggunakan jalan darat, sehingga menjadi wilayah kabupaten penghubung antara kedua provinsi. Selain itu, mengenai jalan yang berada di Kabupaten Paser, dalam hal ini lebih ditekankan kepada jalan kabupaten yang berada di Kabupaten Paser itu sendiri, dalam pengoperasiannya, baik itu dalam hal pengawasan maupun pengendaliannya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kondisi kondisinya yang masih banyak terdapat lubang baik di sisi maupun di badan jalan.

Kerusakan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Paser sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dari data yang ada pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2013, dari total panjang jalan yang ada di kabupaten Paser yang mencapai 780 kilometer, dinyatakan bahwa 180 kilometer mengalami kerusakan dan 258 kilometer dianggap mengalami kerusakan berat atau masih berupa jalan tanah. Ada beberapa titik yang sudah sangat membahayakan seperti poros-poros jalan yang menuju Kecamatan Muara Komam, Kuaro, Long Kali, Long Ikis, Muara Samu, dan juga Batu Engau.

Berdasarkan gambaran dan informasi di atas dapat dilihat besarnya permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan jalan kabupaten yang berada di Kabupaten Paser untuk mengurangi kerusakan jalan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut peranan Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser terhadap pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang berada di wilayah kabupaten Paser, terutama dalam hal pengawasan dan pengendaliannya. Untuk meneliti lebih dalam, maka peneliti mengambil judul **“Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (Studi Kasus di Kabupaten Paser)”**.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Manajemen merupakan suatu bidang studi yang menyangkut manusia, oleh karena itu manajemen sulit didefinisikan. Dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang dapat diterima secara universal. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *Manage* yang memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Secara umum manajemen dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah atau sumber milik organisasi.

Menurut Suradinata dalam Nawawi (2013 : 14) manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin. Hasibuan (2013 : 1) juga menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pelaksanaan manajemen, ada beberapa hal penting yang harus diketahui, salah satunya yaitu fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Ditinjau dari segi fungsinya, Hasibuan (2010 : 21) mengemukakan suatu manajemen memiliki fungsi dasar, yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian

Dalam pelaksanaan suatu tugas, suatu organisasi maupun suatu instansi, banyak hal-hal yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya. Dimana hal-hal tersebut bisa saja merugikan suatu organisasi seperti halnya tidak terlaksananya suatu tugas, terlambatnya waktu penyelesaian, anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lainnya yang menyimpang. Maka dari itu penting rasanya suatu

pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan suatu pekerjaan agar memperoleh jaminan bahwa kegiatan serta hasil atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Nawawi (2013 : 16) menyatakan bahwa pengawasan yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk pengendalian, menurut Strong dalam Hasibuan (2010 : 21) bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Dari pengetahuan pengawasan dan pengendalian menurut para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan.

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan pem- dan diberi akhiran –an guna menunjukkan perihal pembangunan. Menurut Afifudin (2010 : 42) pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian Haryono (2002 : 17) bahwa pembangunan merupakan suatu proses konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Adam dan Juni (2011 : 34), pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju moderinitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus menuju kearah perubahan yang lebih baik sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai oleh masyarakat yang dilaksanakan secara sadar dan terencana mewujudkan pertumbuhan dan perubahan menuju moderinitas dalam rangka pembinaan negara.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan. Pada dasarnya infrastruktur merupakan suatu fasilitas pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005 : 8) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi, sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar pengambilan

kebijakan (Kodoatie : 2005 : 102). Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan sebuah sistem perubahan menuju kearah yang lebih baik sebagai sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sitem lingkungan yang ada di dalam sistem ruang yang pada akhirnya membangun perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Dalam kaitannya mengenai jalan, setelah adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan dipisahkan berdasarkan kewenangannya, yaitu penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi jalan umum dan jalan nasional, penyelenggaraan jalan provinsi oleh Pemerintah Provinsi, penyelenggaraan jalan kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten, dan penyelenggaraan jalan kota oleh Pemerintah Kota (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional menurut peneliti mengenai pembangunan infrastruktur jalan kabupaten adalah pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan yang di lakukan oleh suatu instansi atau dinas terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada pada jalan kabupaten sebagai langkah menciptakan suatu fasilitas pembangunan infrastruktur yang baik dan nyaman.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Menurut Sugiono (2010 : 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Fokus penelitian

Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah atau yang juga disebut fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Pengawasan dan pengendalian infrastruktur jalan Kabupaten Paser :
 - a. Pelaku pengawasan dan pengendalian

- b. Waktu, tempat dan bentuk kegiatan
 - c. Hasil pengawasan dan pengendalian
2. Kendala-kendala dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Paser.

Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Menurut Sugiono (2006 : 159) sumber data terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian melalui observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Untuk informan, peneliti menjadikannya Bapak Ir. Bachtiar Effendi. MT selaku Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dan Bapak H. Ahmad C, ST yang selaku Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser beserta Staf sebagai informan. Kemudian untuk data-data pelengkap, peneliti menemukan beberapa dokumen penunjang penelitian seperti Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Tahunan Jamak dan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1. Metode kepustakaan
2. Metode studi lapangan
 - a. Wawancara
 - b. Observasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Data yang terkumpul biasanya banyak sekali dan terdiri dari berbagai catatan lapangan, komentar peneliti, gambar foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Untuk teknik analisisnya, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman dan Saldana dimana di dalamnya terdapat tiga alur kegiatan, di mana yaitu pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), kedua adalah

penyajian data (*data display*), dan yang ketiga adalah penyimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Ketiga alur ini merupakan suatu kesatuan, baik itu sebelum, saat, dan setelah pengumpulan data pada format paralel untuk membuat domain umum yang disebut analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (Studi Kasus di Kabupaten Paser) menitik beratkan pada pelaku pengawasan dan pengendalian. Tempat, waktu dan bentuk kegiatan. Hasil pengawasan dan pengendalian. Kendala-kendala dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terletak terletak paling selatan, tepatnya secara geografis terletak antara 0°45'18,37' - 2°27'20,82' Lintang Selatan dan 115°36'14,5' - 166°57'35,03' Bujur Timur dengan luas wilayah 11.603,94 Km². Adapun Kabupaten Paser memiliki rata-rata curah hujan 154,18MM pada tahun 2014, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 180,47MM. Kemudian jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Tanah Grogot (Pembangunan Daerah Paser Dalam Angka 2015:3).

Adapun batas-batas Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selat Makasar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Paser memiliki kedudukan yang cukup strategis, karena terletak diantara kabupaten dan kota provinsi yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kedua daerah (provinsi) ini terhubung oleh jalan arteri primer atau jalan negara. Dengan letaknya yang strategis ini, maka Kabupaten Paser menjadi begitu penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kalimantan Timur khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya.

Gambaran Umum Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser merupakan satuan kerja dari pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi kebinamargaan, pengairan dan tata ruang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lokasi kantor Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang beralamat di Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa Km.5 Gedung A Lantai 1 Kav.2 Tana Paser dengan Bapak Ir. Bachtiar Effendy. MT yang bertindak selaku Kepala Dinas instansi pada saat peneitian ini dilakukan.

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser memiliki total 87 pegawai dengan 20 pegawai inti yang bertugas mengawasi maupun mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser memiliki Visi dan Misi yang dijadikan pedoman. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk menelaah kemana Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah “Terwujudnya ruang Wilayah Kabupaten Paser yang menjamin keseimbangan daya dukung lingkungan bagi berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang maju, mandiri, agamis, dan sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, adapun misi yang haru yaitu :

1. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah dan keserasian antar sektor pembangunan dalam wilayah Kabupaten Paser.
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser.

Bersinergi dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Paser.

Pelaku Pengawasan dan Pengendalian

Dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan tata Ruang Kabupaten Paser, dapat dijelaskan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan jalan-jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Paser.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan dan pengendalian adalah pelaku atau orang yang menangani aatau bertanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian infrastruktur jalan kabupaten yang berada di Kabupaten Paser. Adapun mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan jalan kabupaten ini adalah kepala bidang bina atau kepala seksi tentang jalan beserta staff terkait. Kemudian daripada itu, pada proses pengawasan dan pengendalian ini ada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab pada saat proyek dilaksanakan, yaitu seorang pengawas yang ditunjuk

langsung oleh konsultan yang memiliki agenda rutin kelapangan dimana kemungkinan adanya titik rawan terjadinya kerusakan pada jalan guna melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan mengendalikan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Paser.

Tempat, Waktu dan Bentuk Kegiatan

Dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan kabupaten, tempat juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya yang bertujuan untuk mengetahui titik-titik yang kemungkinan rawan mengalami kerusakan baik itu yang disebabkan oleh alam maupun oleh kelalaian manusia itu sendiri. Dengan melihat luas wilayah Kabupaten Paser yang cukup luas, untuk menentukan tempat dari suatu kegiatan pengawasan dan pengendalian, maka terlebih dahulu pihak dinas mengadakan musyawarah atau rapat dalam penentuannya dengan melihat kembali keadaan dana yang tersedia. Hal semacam ini rutin dilakukan setiap tahun agar pihak dinas dapat memilah dimanakah tempat yang akan diprioritaskan melihat tingkat kerusakan yang dialami.

Kemudian mengenai waktu dan bentuk kegiatan pelaksanaan dari suatu kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah setiap bulan karena memang sudah menjadi agenda rutin. Namun berbeda halnya apabila pada saat adanya suatu proyek pembangunan, maka akan dilaksanakan setiap harinya selama proyek itu berlangsung. Secara umum, proyek merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seseorang atau *owner* atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai keinginan daripada *owner* atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam pelaksanaan proyek, pemilik proyek atau perwakilan dan pelaksana mempunyai hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui bersama antara pemilik proyek dan pelaksana proyek.

Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Hasil dari suatu kegiatan dapat dilihat dari bagaimana peningkatan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Paser. Untuk itu, indikator-indikator penting dalam suatu kegiatan juga harus menjadi persatuan. Adapun penelitian ini adalah indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Paser.

Keberhasilan sendiri sendiri merupakan realisasi dari sebuah sasaran atau bahkan beberapa sasaran. Adanya sasaran juga sangat berpengaruh, karena sasaran merupakan suatu arah tujuan dan merupakan hal yang penting untuk mengukur kemajuan yang dicapai.

Adapun yang menjadi indikator dari keberhasilan pengawasan dan pengendalian ini terkait kontrak, yang pertama adalah ketepatan waktu pengerjaan dan juga daya serap keuangan. Dimana dimaksud terkait kontrak ialah pengukuhan dari pelaksanaan dari sebuah proyek, apakah sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitu juga mengenai daya serap keuangannya,

apakah sesuai dengan perkiraan anggaran atau tidak. Mengenai tingkat keberhasilannya, pihak dinas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan infrastruktur yang baik bagi masyarakat. Namun kembali lagi kemasyarakat, tentang bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu, apakah mereka juga memperhatikan dan mau menjaga agar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat terjaga dan bertahan dengan baik, karna terkadang masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana memelihara jalan seperti halnya melintas dengan kendaraan dengan muatan yang berlebihan.

Kendala-kendala yang dihadapi

Kendala dalam pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Paser diantaranya adalah lebih kepada faktor sosialnya dimana masyarakat terkadang tidak menerima apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah dalam penetapan harga pembebasan lahan untuk proses pembuatan atau pelebaran jalan. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah memenuhi standar harga yang ada, dan kebanyakan masyarakat sendiri tidak memahami bahwasanya fasilitas yang akan dibangun itu untuk kedepannya juga dimaksudkan dalam hal memudahkan mereka sendiri. Kemudian selain itu, faktor seperti keadaan cuaca yang tidak mendukung juga terkadang menghalangi proses pengerjaan proyek atau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian. Selain itu juga keadaan sumberdaya manusia yang kurang memadai juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan suatu proyek, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas maupun jangka waktu pengerjaan proyek. Pada dasarnya program dan kegiatan pembangunan daerah merupakan upaya dan tindakan kongkret dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sumberdaya, termasuk dana dan tenaga yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Walaupun masih banyak terdapat kendala dalam pengawasan dan pengendalian jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Paser, pihak Dinas Bina Marga tetap senantiasa akan elalu berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan berupaya semaksimal mungkin untuk meyediakan fasilitas yang baik dan nyaman bagi masyarakat umum.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan infrastruktur jalan kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser sudah dilaksanakan baik sesuai. Dalam prosesnya, pihak dinas bekerjasama dengan kontraktor yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Daerah untuk memantau

proses pengerjaan suatu proyek atau kegiatan pembangunan. Dimana hasil pantauan dari kedua belah pihak selanjutnya akan dirapatkan untuk mengetahui apakah ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Waktu, tempat dan bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan setiap bulannya, dimana sebelumnya hal ini sudah dirapatkan terlebih dahulu, baik dalam musyawarah desa, kecamatan dan kabupaten. Kemudian diatur sedemikian rupa untuk memilah kapan dan dimanakah kegiatan akan dilaksanakan. Keberhasilan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dapat dilihat dari kesesuaian antara kontrak, kemudian waktu dan daya serap keuangan. Pada saat ini tingkat keberhasilan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang berada di Kabupaten Paser sudah cukup baik dilihat dari perkembangan jalan yang signifikan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten diantaranya adalah faktor sosial menyangkut masalah pembebasan lahan, kemudian hal lain yang menjadi kendala umum yaitu masalah cuaca yang tidak mendukung, dan terakhir adalah masalah sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam menangani proyek. Hal inilah yang membuat pengerjaan suatu proyek menjadi berlarut-larut bahkan gagal.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten paser biasa menerima apabila sewaktu-waktu masyarakat memberikan masukan-masukan semisal dari hasil musyawarah desa, kecamatan, maupun musyawarah atau rapat tingkat kabupaten mengenai pengadaan atau perbaikan jalan yang perlu selama itu bersifat positif dan masih memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian menjadikan masyarakat kemudian menjadikan masyarakat sebagai partner dalam melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya masalah pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.
2. Dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten hendaknya pihak dinas melakukan kolaborasi dengan masyarakat langsung, hal ini maksudnya pihak dinas dapat merangkul langsung masyarakat untuk mengawasi perkembangan atau keadaan jalan kedepannya. Diharapkan agar masyarakat bisa berperan aktif pula apabila terjadi kerusakan, masyarakat bisa melaporkan langsung kepada pihak dinas agar perbaikan dapat dilakukan dengan secepatnya.
3. Untuk mengatasi kendala seperti faktor sosial mengenai masalah pembebasan lahan, kemudian angkutan kendaraan yang melebihi beban muatan lintas jalan, diharapkan pihak dinas untuk lebih gencar dalam pemberian sosialisasi

langsung kepada masyarakat tentang pentingnya jalan kabupaten. Pemberian sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembebasan lahan dan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan, agar masyarakat tidak egois dengan kehendaknya sendiri karena pembangunan jalan adalah untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri khususnya. Kemudian juga memberikan informasi mengenai pemeliharaan jalan seperti halnya tentang batas muatan untuk melintas pada jalan dan kemungkinan akibat yang ditimbulkannya. Hal ini agar masyarakat mengetahui bahwasanya jalan mempunyai batasan beban tertentu dalam hal menahan beban yang melintas di atasnya.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Afifudin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori dan Implikasi di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Bappeda Kabupaten Paser (2015). *Pembangunan Daerah Paser Dalam Angka 2015*. Paser : Bappeda Kabupaten Paser.
- Hasibuan, Malayu S.P (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- (2010). *Organisasi dan Komunikasi : Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. (2011). *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT Rajagrafindo
- Sudriamunawar, Haryono. (2002). *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Paser.